NAMA : AZIZA AULIA RAHMA

NPM : 2012011021

MATA KULIAH : PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

DOSEN : ATIK KARTIKA ,S.Pd., M.Pd.

TUGAS ARTIKEL

PENEMBAKAN TERHADAP 6 LASKAR FPI DITINDAK LANJUTI KOMNAS HAM

Kasus baku tembak antara pihak kepolisian dengan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek, Senin, 7 Desember 2020 lalu, masih belum menemukan titik terang. Keempat pelaku hingga kini masih dalam pengejaran.Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengaku, untuk melakukan pencarian terhadap keempat laskar FPI tersebut pihaknya dibantu oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.Dalam peristiwa baku tembak tersebut, polisi juga menembakkan timah panas kepada enam anggota FPI lainnya. Mereka tewas ditempat.Kasus penembakan tersebut kini tengah dalam sorotan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jenazah Laskar FPI Dibawa ke Rumah Duka di Petamburan. Mobil ambulans yang membawa jenazah laskar Front Pembela Islam (FPI) memasuki Jalan KS Tubun, Jakarta. Sebanyak 6 jenazah laskar FPI yang baku tembak di Jalan Tol Jakarta-Cikampek diserahkan kepada pihak keluarga untuk disalatkan.

Komnas HAM telah menggali keterangan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terkait investigasi dugaan pelanggaran HAM pada kasus kematian enam anggota laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai, Kapolda Metro Jaya bersikap kooperatif dan transparan dalam pemeriksaan investigasi kasus kematian enam laskar FPI tersebut. "Pak Kapolda memberikan keterangan soal kronologi peristiwa terkait meninggalnya 6 anggota FPI, juga menyampaikan apa saja langkah yang sudah ditempuh oleh Polda pascakejadian. Jadi soal otopsi, uji balestik, itu tadi disampaikan. Artinya Pak Kapolda menyampaikan keterbukaan dari kepolisian," kata Beka di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020). Beka melanjutkan, Fadil mempersilakan kepada tim Komnas HAM untuk mendapatkan informasi apa pun, termasuk barang bukti yang dimiliki kepolisian dalam kasus ini. "Pak Kapolda sepakat untuk tindak lanjutnya. Artinya Kalau ada barang bukti, alat bukti yang dibutuhkan oleh Komnas, akan segera ditindaklanjuti. Minggu ini akan cari waktu bersama sehingga kami bisa melihat apa saja tambahan alat bukti yang dimiliki oleh oleh kepolisian," jelas Beka.

Terkait kasus penembakan ini, Komnas HAM mengatakan, bahwa mereka menargetkan investasinya akan diselesaikan dalam sebulan. Target itu sangat mungkin jika keterangan dibutuhkan cepat didapatkan. "Kami upayakan dalam waktu sebulan ini selesai. Semoga semua pihak siap ketika dimintai keterangan tambahan," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya, Selasa (15/12/2020). Hingga saat ini Beka mengaku pihaknya belum menemukan kendala. Dua orang yang dipanggil pada Senin 14 Desember 2020, yakni Dirut Jasa Marga Subakti Syukur dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, sangat kooperatif. Mereka datang sesuai jadwal panggilan Komnas HAM. Terlebih, lanjut Beka, Kapolda Irjen Fadil juga memberikan kemudahan kepada tim Komnas HAM untuk mendapatkan informasi apa pun, termasuk barang bukti dimiliki kepolisian terkait kasus ini.

Sekretaris Umum FPI Munarman memberikan keterangan terkait aksi penyerangan terhadap polisi oleh Laskar FPI di Petamburan III, Jakarta, Senin 7 Desember 2020. Munarman menegaskan, tidak ada insiden tembak menembak antara Laskar FPI dan polisi. Selain itu, Beka juga menyatakan, tidak menutup kemungkinan pemeriksaan akan dilakukan tim Komnas HAM terhadap elemen Front Pembela Islam (FPI). Dia menjelaskan, hal itu dilakukan berdasarkan pengembangan hasil keterangan yang dimiliki Komnas HAM saat ini.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (tengah) bersama Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman (kedua kiri) memberi keterangan terkait penyerangan petugas di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 7 Desember 2020. Polisi menembak mati enam pengikut Rizieq Shihab pada dini hari tadi. Beka juga tidak menutup kemungkinan Komnas HAM akan memanggil kembali Fadil Imran untuk memberi keterangan. Namun, hal itu menunggu hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan Komnas HAM.